

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perubahan pemerintahan Indonesia secara desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola perubahan hubungan tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban merujuk pada undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjalin tercapainya standar pelayanan public minimal (Simanjuntak, 2002). Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana

sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (Sepuluh Persen). Penggunaan Alokasi Dana Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu : Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan Alokasi dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup serta peranggulan kemiskinan. Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini menjadi persoalan yang cukup rumit karena permasalahan sumber daya manusia, di tingkat pendidikan perangkat desa dan pemahaman perangkat desa tentang undang-undang yang mengatur Alokasi Dana Desa yang masih kurang. Permasalah sumber daya manusia merupakan faktor utama masalah Alokasi Dana Desa karena perangkat haruslah paham tentang bagaimana tatanan keuangan desa berdasarkan undang-undang. Tingkat pendidikan

perangkat sangatlah penting bagi terlaksananya Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang berbanding lurus juga dengan pemahaman perangkat desa tentang sistem keuangan yang berlaku saat ini. Persoalan pemahaman undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mengatur terlaksananya Alokasi Dana Desa sangatlah penting dipahami oleh perangkat supaya tidak ada penyelewangan, penggelapan dana dan peyimpangan yang berlaku. Dengan ini telah diterapkan Undang-Undang desa tersebut nantinya tingkat kerawanan korupsi akan sangat tinggi terjadi, itu dikarenakan para perangkat desa tidak terbiasa mengelola uang Negara sebesar itu. Sistem teknologi informasi menjadi kunci transparansi pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga audit, sehingga dapat meminimalisir kesalahan penyusunan laporan Alokasi Dana Desa. Pada system teknologi informasi ini memudahkan perangkat desa untuk mengelola data dana desa secara efisien dan akurat. Dengan dana kurang lebih satu milyar rupiah per desa, setidaknya ada kurang lebih dua ratus enam puluh enam milyar uang Negara yang mengalir ke desa-desa. Pada system informasi yang saya buat yaitu dengan berbasis website dengan nama SITKD (Sistem Informasi Tata Kelola Dana Desa) sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan aliran dokumen. *Data Flow Diagram (DFD)*, *Entiti Relationship Diagram (ERD)* serta menggunakan PHP sebagai server web dan Mysql sebagai basis data. Pada aplikasi ini terdapat 5 fitur yaitu: Dashboard, Dana Masuk, Dana Keluar, Rekapitulasi Dana, dan pelaporan pembiayaan dan anggaran hanya dapat diakses oleh bendahara desa. System teknologi informasi menunjang pengelolaan dana pemerintah yang diterima di tiap

desa sehingga dapat direncanakan lebih terperinci dan sistematis. Diharapkan dengan adanya aplikasi system informasi tata kelola alokasi dana desa ini dapat memberikan kemudahan dalam penggunaan anggaran dana desa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kesuksesan Alokasi Dana Desa ini sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain yaitu keisapan aparat pemerintah desa sebagai pelaksanaan lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa sehingga system pertanggung jawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Bertitik tolak dari hal tersebut serta latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan saat ini adalah:

1. Bagaimana cara pengawasan realisasi Alokasi Dana Desa?
2. Bagaimana membangun sistem yang mengelola dana desa?

## **1.3 Batasan Masalah**

1. Aplikasi ini memiliki fitur Dashboard, Kas Masuk, Kas Kekuar, Laporan Alokasi Dana Desa, dan Manajemen User.
2. Aplikasi ini sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur tentang tata kelola Alokasi Dana Desa.
3. Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh 3 user yaitu bendahara desa, kepala desa dan sekretaris desa.

#### 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah didefinisikan, maka tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut.

1. Mempermudah perangkat desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa.
2. Transparansi pengelolaan keuangan perangkat desa mulai dari perencanaan sampai audit.
3. Mempermudah pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini memberikan keuntungan beberapa pihak diantaranya yaitu:

Bagi Pemerintah Desa:

1. Mempermudah kinerja perangkat desa dalam penyusunan laporan keuangan desa.
2. Mempermudah pemantauan dan pengawasan pemerintah pusat dan daerah.
3. Meningkatkan efektifitas kerja perangkat desa.
4. Transparansi laporan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat.



## 1.6 Metode Penelitian

Tahapan pengembangan ini merupakan tahapan dimana terdapat beberapa metode dan tahapan yang dilakukan dalam penelitian dan pengumpulan data, agar sistem yang akan dibangun dapat sesuai yang dibutuhkan dan diinginkan.

### 1.6.1 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan kepala Desa Caturtunggal untuk memperoleh beberapa informasi tentang apa-apa saja yang jadi masalah di Desa Caturtunggal.

#### 2. Kajian Dokumen

Kajian dokumen yaitu dokumen-dokumen yang digunakan di pemerintahan desa yang berhubungan dengan dana desa.

#### 1.6.1.1 Metode Observasi

Desa Caturtunggal merupakan desa yang menerima Alokasi Dana Desa dan melakukan kegiatan pemerintahan menggunakan dana tersebut. Badan permusyawaratan Desa Caturtunggal melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### 1.6.1.2 Metode Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada informan. Wawancara yang dilakukan didalam penelitian ini

terdiri dari dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap persiapan peneliti membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Alokasi Dana Desa. Untuk selanjutnya peneliti membuat kesepakatan berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah melakukan wawancara peneliti memindahkan hasil catatan tangan kedalam computer untuk ditampilkan dalam hasil penelitian sehingga peneliti dapat melakukan analisis dan interpretasi data sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dilakukannya.

### **1.6.2 Metode Analisis**

Analisis adalah pengamatan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Dalam hal ini peneliti menganalisis data yang dihasilkan melalui wawancara terhadap subyek penelitian. Sehingga peneliti dapat memecahkan pokok-pokok masalah yang timbul dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti dapat menyimpulkan beberapa pokok persoalan. Peneliti juga dapat memberikan pemecahan masalah dari beberapa saran yang merupakan bagian dari solusi dalam memecahkan persoalan yang timbul dalam penelitian ini.

### **1.6.3 Metode Perancangan**

Setelah data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul, langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Analisis kebutuhan perangkat lunak merupakan tahap yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam membuat perangkat lunak, meliputi kebutuhan masukan (input), kebutuhan keluaran (output), kebutuhan proses, kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan perangkat keras.

## 2. Perancangan Perangkat Lunak

Setelah data terkumpul, selanjutnya akan dibuat rancangan perangkat lunak. Rancangan perangkat lunak ini berupa, *Data Flow Diagram (DFD)*, *Entity Relationship Diagram (ERD)* untuk menggambarkan perangkat lunak yang akan dibangun dan dirancang untuk pengujian perangkat lunak.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori tentang Tata Kelola Alokasi Dana Desa Caturtunggal

#### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN



Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai gambaran Sistem Informasi Tata Kelola Alokasi Dana Desa pada Desa Caturtunggal

## BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.

